

Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018 - 2019

Herdin Arie Saputra¹, Dyah Mutiarin², Achmad Nurmandi³
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Correspondence: ¹herdin.arie.2012@fisipol.umy.ac.id
²mutiarin@yahoo.com
³nurmandiachmad@gmail.com

Article History

Submitted:
2020-05-04
Reviewed:
2020-06-12
Approved:
2020-06-23

Abstract

In Indonesia, the role of women in the political world is not statistically arguably contributing massively, due to several resistance that must be considered. Women's participation in politics should be balanced with men who are massively dominant in political positions. Because the rights between men and women's rights have the same recognition in state life in Indonesia based on the 1945 Constitution. The Islamic view is to always pay attention to the concepts of justice, wholeness, harmony, the balance of fellow human beings with nature. The purpose of this study is to determine women's participation in politics in Indonesia and to be a reference for women to participate in politics (executive and legislative). This type of research used in this research is qualitative research. The analysis used from this paper is descriptive analyzes. Analyzes were performed using the Nvivo 12 plus software. The results of the study are the lack of women's education on politics, regeneration of political parties, issues of permission from spouses, financial capital, descendants of political figures, patriarchal beliefs and culture that are still thick. This is an obstacle for women in participating in politics.

Keywords: *Equality, Participation, Politics, Women*

Abstrak

Di Indonesia, peran perempuan dalam dunia politik secara statistik belum bisa dibidang berkontribusi secara masif karena adanya beberapa hambatan yang harus diperhatikan. Partisipasi perempuan dalam politik seharusnya bisa seimbang dengan laki-laki yang secara masif dominan menduduki jabatan politik. Karena, hak antara laki-laki dengan hak perempuan punya pengakuan yang sama dalam kehidupan bernegara di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pandangan Islam menggambarkan untuk selalu memperhatikan konsep keadilan, keutuhan, keserasian, keseimbangan sesama umat manusia ataupun dengan alam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia serta menjadi acuan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik (eksekutif maupun legislatif). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun analisis yang digunakan dari tulisan ini yaitu analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan *software* Nvivo 12 plus. Hasil penelitian yaitu

minimnya pendidikan wanita terhadap politik, kaderisasi partai politik, persoalan izin dari pasangan, modal finansial, keturunan tokoh politik, kepercayaan dan budaya patriarki yang masih kental. Hal tersebut menjadi hambatan untuk perempuan dalam berpartisipasi dalam politik.

Kata Kunci: Kesetaraan, Partisipasi, Perempuan, Politik

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik dari sektor ekonomi, social, politik, dan budaya, selanjutnya diikuti dengan tuntutan yang bergerak dibidang intelektual. Dengan perubahan dalam berkehidupan yang maju, aksi, dan tuntutan dari perempuan pun tidak ketinggalan. Selama ini beranggapan bahwa perempuan berada pada *second class*, tertindas dan tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka berasumsi diperlukan perjuangan menuju emansipatif, agar perempuan mampu memperjuangkan kepentingan dirinya, tidak tergantung pada orang lain. (Hulwati, 2008:63).

Kesadaran politik perempuan di Indonesia sejak Kongres Perempuan Pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Dalam bentuk partisipasi yang nyata terhadap kesadaran politik dan penggunaan hak politik perempuan terlihat dalam Pemilu tahun 1995, di mana mereka mempunyai hak memilih dan dipilih. Hak antara laki-laki dengan hak perempuan punya pengakuan yang sama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia dan diakui secara tegas. Pengakuan tersebut telah dibuat landasan hukum dan perjanjian berbagai konvensi yang menjamin hak berpolitik mereka (Mukarom, 2008:257). Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan kesempatan untuk semua warga negara untuk terus menerus mengembangkannya melalui konsesus-konsesus nasional (Sudharmono, 1995:1).

Jika dilihat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak adanya hal-hal yang bersifat diskriminatif gender. UUD 1945 tidak memuat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, terkhusus di dalam organisasi Islam. Dapat dilihat dalam Konstitusi (UUD 1945) pasal 27, menyertakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang setara/ sama di depan hukum. Karena itu laki-laki dan perempuan memiliki persamaan atas hak hukum dalam semua bidang kehidupan, termasuk peresamaan dalam bidang organisasi masyarakat.

Indonesia adalah negara yang demokrasi, secara konstitusional Indonesia menjamin hak warga negaranya. Namun secara kenyataannya, ‘Undang-undang’ ini belum direalisasikan secara maksimal, dengan adanya peraturan yang menenai kuota 30%. Jelas saja ini belum sesuai apa yang diamanatkan oleh Konstitusi (UUD 1945). Menurut Darmayanti Lubis, tahun 2004-2009 representasi perempuan meningkat menjadi 61 orang atau 11,09 persen dari 550 anggota DPR RI. Selanjutnya pada tahun 2009-2014 kembali meningkat menjadi 101 orang atau 18,04 persen dari 560 anggota DPR RI. Namun pada tahun 2014-2019 jumlah perempuan yang ada di DPR RI menurun, hanya 97 orang atau 17,32 persen dari 560 kursi (Kompas, 2019).

Secara etimologis, kata 'wacana' dimulai pada abad ke-14. Ini diambil dari kata Latin 'discursus' yang berarti 'percakapan' (McArthur et al., 2018:2). Dalam penggunaan saat ini, istilah ini menggantikannya dengan kuantifier untuk berbagai keperluan, tetapi dalam semua kasus ini terkait dengan bahasa, dan menjelaskannya dalam beberapa cara. wacana didefinisikan secara harfiah sebagai 'pidato atau tulisan serius pada topik tertentu' (O'Halloran, 2011:1-2). Dalam pengertian umum ini, ia menggabungkan mode lisan dan tulisan, meskipun kadang-kadang itu terbatas pada ucapan yang disebut percakapan serius antara orang. Batasan ini juga tersirat dalam kata saat digunakan sebagai kata kerja dalam beberapa denotasi kata 'wacana'. Pertama, mengacu pada topik atau jenis bahasa yang digunakan dalam konteks yang pasti. Di sini, dimungkinkan untuk berbicara tentang wacana politik, wacana filosofis dan sejenisnya. Kedua, kata 'wacana' terkadang digunakan untuk membela apa yang diucapkan, sedangkan kata 'teks' digunakan untuk menunjukkan apa yang ditulis. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan dalam teks/wacana yang disoroti di sini tidak selalu didefinisikan dengan tajam. Kedua istilah ini kadang-kadang digunakan secara bergantian dan dalam banyak kasus diperlakukan secara berbeda. Dikotomi 'wacana/teks' sering dikaitkan dengan dikotomi 'proses/produk' masing-masing. Ketiga, ia digunakan untuk membedakannya dari konsep tradisional 'kalimat', unit analisis bahasa tertinggi: wacana mengacu pada urutan bahasa yang muncul secara alami (Carter & Nunan, 1975; Nunan, 1993). Wacana tidak terbatas pada pembicara tunggal atau penulis, tetapi dapat menerima pertukaran lisan atau tertulis yang dihasilkan oleh dua orang atau lebih, ini adalah makna terakhir dari istilah yang merupakan dasar dari pendekatan yang dikenal sebagai analisis wacana (Salzmann & Trask, 2000:52-57).

Menurut S. Huntington dan J. M. Nelson (dalam Budiardjo, 2013:367-368) Partisipasi politik yaitu warga negara yang berkegiatan dan bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud dapat memengaruhi dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berpartisipasi bisa dilakukan dengan sendiri maupun dengan kelompok, terorganisir, dan sporadis, dengan damai atau pun dengan kekerasan, ilegal ataupun legal, efektif maupun sebaliknya (*citizens who are involved and act as individuals, with a view to influencing government policy making. Participating can be done with groups themselves, organized, and sporadically, peacefully or violently, illegally or legally, effectively or vice versa*).

Partisipasi politik pada perempuan sangatlah kurang, terkhusus pada saat menggunakan hak pilih suara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2013, kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pilkada disebabkan karena berbagai macam faktor, yaitu kurangnya sosialisasi dari KPUD dalam memilih kepala daerah (Yuriska, 2015:6). Desain kuota dapat secara tidak sengaja menciptakan ketidaksetaraan baru di antara perempuan dalam pemerintahan, dan masuknya perempuan ke dalam ruang-ruang yang sebelumnya didominasi laki-laki dapat dipenuhi dengan serangan balik patriarki, yang memperkuat penindasan gender. Di Negara Kenya sendiri untuk kasus secara teoritis mempertanyakan upaya inklusi untuk memberdayakan perempuan secara lebih umum, pentingnya untuk mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan hak-hak perempuan dan perlunya aktivis hak-hak perempuan untuk memprioritaskan proses *bottom-up* paralel (Zarzecki, 2019:16). Kekuatan parlemen internasional regional memiliki dampak yang kuat pada kerangka kebijakan pemerintah untuk kesetaraan gender (Ertan, 2020:20). Struktur ekonomi regional penting untuk pengurangan stereotip sifat gender, sementara integrasi spasial dan pasar kerja penting bagi disipasi favoritisme etnis dalam evaluasi pemimpin, penting buat pembuat kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi bias politik dalam konteks yang beragam, sangat memperhatikan stereotip kelompok sosial yang kurang terwakili dan mengevaluasi bagaimana mereka dapat menerjemahkan ke dalam memahami sifat-sifat yang terkait dengan kepemimpinan yang baik, di sisi lain akar bias sosial berasal dari fenomena structural yang kompleks, seperti kesempatan kerja terbatas untuk perempuan dan minoritas, dan karenanya memerlukan perubahan politik dan ekonomi yang transformatif (Avdeyeva & Matland, 2020:12).

Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif sangatlah rendah, jika dilihat dari populasi, wanita cenderung lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, rendahnya partisipasi

ini disebabkan oleh psikologis, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, juga yang terpilih ini tidak memiliki kompeten untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kebijakan (Oktaviani Adhi Suciptaningsih, 2011:69). Partisipasi perempuan dalam politik sangat terbatas, itu karena budaya patriarki dalam pemerintahan maupun swasta. Kriminalisasi politik, korupsi dan pelecehan seksual yang meluas dan memperkuat patriarki. Bahkan masyarakat patriarki menganggap bahwa perempuan sebagai objek pelecehan seksual (Chowdhury, 2009:556). Kekuasaan perempuan dalam sektor politik di DKI Jakarta masih sangat minim daripada laki-laki yang selama ini masih mendominasi, karenanya belum ada para perempuan yang pernah mencalonkan diri ataupun dicalonkan oleh partai politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, para perempuan harus mempunyai usaha yang sungguh-sungguh untuk memperkuat diri dan meningkatkan lagi dalam segi kualitas (Wahid, 2013:81). Partisipasi politik perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Riau masih belum efektif, dikarenakan kurang menguasai masalah dengan perempuan, dalam penyusunan anggaran yang dilakukan kurang begitu maksimal atau tidak berjalan dengan baik, serta anggota dewan perempuan tidak produktif dalam melahirkan kebijakan daerah (Yopi Pranoto, 2015:7). Partisipasi politik perempuan sangat kuat jika didukung dengan kesatuan iktikad, kesatuan ini bukan hanya ada pada perempuan, namun juga ada di laki-laki, sehingga mereka bisa untuk bekerja sama dalam membangun masyarakat Islam yang beriman, para wanita juga harus didukung dengan paham agama dan berilmu, tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, cakap, kritis, serta mempunyai semangat juang Islam yang tinggi dan berani, selanjutnya para wanita juga harus kompeten dibidangnya (Mantovani & Santoso, 2015:86). Partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi beberapa tantangan, karena budaya patriarki yang tidak menghambat akses perempuan untuk berpolitik, terutama pada lembaga legislatif serta kurangnya pendidikan tentang politik (Marhayani, 2017:10).

Harus diutamakan untuk memperjuangkan kondisi masyarakat serta lebih memantapkan kedudukan perempuan yaitu di mana sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan menghentikan kekerasan terhadap kaum perempuan harus di tingkatkan lagi (Anshor, 2008:2). Partisipasi perempuan dipolitik pada negara-negara berkembang ada kecenderungan yang masih relatif rendah di bandingkan oleh para kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka banyak terlibat di dalam urusan yang biasanya memang sudah diposisikan sebelumnya yaitu menjadi urusan rumah tangga (Mukarom, 2008:261). Faktor utama

rendahnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh budaya patriarki yang berkelindan di antara stakeholder, partai politik, dan masyarakat pemilih (Ani Purwanti, 2015:193). Di Swedia para laki-laki sangat dominan dalam posisi semua bidang pekerjaan, karenanya pemerintah Swedia membuat kebijakan terkait dengan kesetaraan gender agar para laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam berbagai sektor bidang pekerjaan, untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban di semua bidang kehidupan (Szymoniak, 2011:56-67). Di Italia sendiri para wanita sangat sedikit untuk memasuki dunia kerja, karena itu dibuat suatu kebijakan tentang kesetaraan yang berkaitan dengan pekerjaan, agar para perempuan turut andil dalam dunia pekerjaan, pejabat pemerintah maupun terkabung dalam lembaga politik (Vianello, 2014:318-329). Setelah berlakunya Undang-Undang pada tahun 2004 tentang hak-hak perempuan di dalam negeri dan sebagai model dunia Islam, berlakunya kebijakan tersebut dikarenakan masyarakat Maroko ingin terlibat dalam dialog publik tentang kesetaraan gender. Hal ini merupakan reformasi mendasar pada status perempuan Maroko dan menegaskan bawasannya hak-hak perempuan adalah bagian dari demokrasi dan keadilan social (Ennaji, 2016:7). Begitu juga kaum perempuan Kuwait yang mendesak pemerintahnya untuk memberikan hak pilih bagi mereka. Hal ini pun akhirnya terealisasi dengan terpilihnya Massouma al-Mubarak yang duduk di kursi perlemen pada tahun 2005 (Muasomah, 2019:253). Keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik di Ghana tidak bisa dipungkiri rendah, karena pemangku kepentingan utama di negara ini adalah perempuan, dan juga memiliki kekuatan memobilisasi besar untuk politisi dari partai politik, para perempuan Ghana sangat berpengalaman dalam memberikan kontribusi di sektor politik, dan selanjutnya mempunyai pengetahuan dalam pembangunan di tingkat nasional atau lokal (Bawa & Sanyare, 2013:286). Partisipasi perempuan telah meningkat di Paraguay, baik dalam transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi, bukti yang sangat maju yaitu lembaga hukum mengenai reformasi gander ekuitas (pelaksanaan hukum terhadap kekerasan gender). Di bidang politik beberapa organisasi feminis perempuan diperkenalkan ke legislatif, pandangan kesetaraan yang efektif dengan laki-laki (Patricia & Villagra, 2015:222).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Auerbach & Silverstein, 2003 (Sugiyono, 2018:3) adalah penelitian yang menganalisis dan menafsirkan teks dan wawancara yang bermaksud menemukan makna

suatu fenomena. Penelitian kualitatif dilakukan dengan membandingkan dan memberikan informasi yang kredibel yang dapat diperoleh (Moleong, 1993). Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi dari berbagai penelitian tentang solusi yang efektif. Analisis yang digunakan dalam makalah ini adalah deskriptif. Pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 plus. Sumber data untuk penelitian ini dikonsentrasikan pada data sekunder termasuk situs web yang relevan dan bereputasi dalam menyediakan berita berdasarkan wawancara dengan beberapa informan terkait partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Analisis Nvivo 12 plus dalam penelitian ini menggunakan fitur analisis crosstab, analisis peta konsep, dan analisis penelitian teks (Brandão, 2015:492). Analisis crosstab digunakan untuk proses pembuatan tabel kontingensi dari distribusi frekuensi variabel multivariat, disajikan dalam format matriks. Sedangkan Concept Map adalah memetakan pemikiran dalam suatu konsep dan proposisi berdasarkan variabel. Sedangkan penggunaan analisis penelitian teks adalah untuk mencari makna, kata-kata, dan konteks yang terkait dengan masalah penelitian dalam partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Analisis konten situs web dari beberapa media nasional tentang partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap, pertama yaitu *capture website* media bereputasi, dan artikel; langkah kedua adalah analisis data dengan perangkat lunak Nvivo 12 Plus, membaca teks dan konten yang memiliki kesamaan dengan data lain, menemukan item yang saling terkait, mencari makna, kata-kata, dan konteks yang saling terkait antara situs website dan artikel; tahap ketiga adalah menyimpulkan dan memaknai konten situs website, dan artikel yang telah dianalisis. Nvivo digunakan untuk menganalisis data kualitatif demi menghasilkan hasil yang lebih profesional (AlYahmady & Al Abri, 2013:185).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia pada tahun 2018-2019. Secara teoritis manfaat penelitian ini untuk dapat memperkaya wawasan/ pengetahuan kepada para pembaca terlebih yang ingin mengetahui partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Sedangkan untuk manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan agar perempuan ikut serta berpartisipasi lebih banyak lagi dalam bidang politik (Eksekutif dan Legislatif).

Islam secara normatif juga secara tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan Islam menggambarkan manusia untuk selalu memperhatikan konsep keadilan, keutuhan, harmoni, keseimbangan, baik sesama manusia maupun alam.

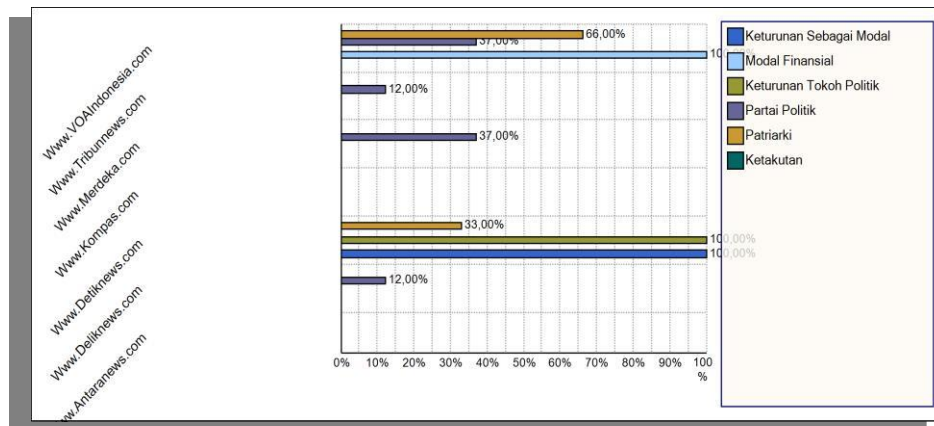
Kesetaraan dan keadilan didasarkan pada prinsip-prinsip yang memposisikan pria dan wanita sama dengan makhluk Tuhan. Selanjutnya juga disampaikan dalam surat "an-Nahl; (16): 97", "al-A'raf; (7): 172", dan huruf "al-A'raf; (7): 22". Dalam surah ini memiliki konsepsi yang bermakna tentang kesetaraan dan kesetaraan gender serta urusan organisasi politik masyarakat Islam, seharusnya tidak dominan untuk satu gender (Asnawi, 2012:68).

Dari sekian banyak pemimpin perempuan di negara ini yang sukses, di sisi lain, masih banyak kendala yang sering dialami perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik. Seperti terkait dengan perempuan dalam politik, hampir semua negara berkembang, melalui hambatan baik secara struktural maupun budaya. Masalah struktural sering terkait dengan pendidikan, ekonomi, status sosial, dan pekerjaan. Apa yang dilakukan wanita dalam pekerjaannya sering dianggap pekerjaan kelas dua yang sulit diseimbangkan dengan pria. Berdasarkan pemikiran yang ada, penelitian ini berupaya melihat kembali bagaimana partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia pada tahun 2018-2019 berdasarkan discourse analisis.

PEMBAHASAN

Bergerak dari analisis politik modern di era sekarang, partisipasi politik menjadi persoalan yang penting, dan sekarang banyak dipelajari terkait hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik pada awalnya memfokuskan diri pada partai sebagai jembatan, tetapi dengan berkembangnya demokrasi saat ini, begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengambil/mempengaruhi kebijakan. Menurut Harbert McClosky, partisipasi politik yaitu kegiatan dari warga dengan cara sukarela di mana mereka turut andil dalam mengambil bagian untuk proses pemilihan pemimpin, dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung, di dalam proses pembentukan kebijakan (*Voluntary citizen activities in which they take part in the process of electing leaders, both directly and indirectly, in the policy making process*) (Budiardjo, 2013:367). Kegiatan yang menunjukkan berbagai bentuk dan intensitasnya dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Biasanya mempunyai perbedaan jenis partisipasi berdasarkan dari keseringan dan kesungguhannya. Orang mengikuti kegiatan secara intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak membuang waktu secara percuma dan tidak dari gagasan sendiri (contohnya seperti dalam memberikan hak politik dalam pemilu). Sebaliknya, sangat minim jumlah orang yang secara sering dan sepenuh waktu mengikutsertakan diri dalam politik. Keikutsertaan rakyatnya dalam

menangani masalah-masalah yang muncul dari perbedaan-perbedaan status sosial, etnis, agama, budaya dan ekonomi. Melalui partisipasi politik dapat merubah situasi menjadi lebih baik, dalam pembentukan identitas negara, serta loyalitas kepada negara.



Grafik 1. Hambatan Perempuan dalam Politik

Di Indonesia, peran perempuan di dalam dunia politik secara statistik belum bisa dibilang berkontribusi atau belum menggembirakan. Dalam bidang politik termasuk pada posisi yang strategis/pimpinan yang dapat menentukan kebijakan dipemerintahan baik ditingkat daerah maupun pusat masih relatif kecil, dan didominasi oleh para laki-laki. Tidak berarti tokoh politik perempuan yang ada dipemerintahan tidak ada, masih sangat kecil jika dijumlah daripada tokoh politik laki-laki. Rendahnya tingkat pendidikan wanita terhadap politik. Kondisi seperti ini yang sering dirasakan bahwa sesungguhnya sangat sulit untuk merekrut/ menyeleksi para perempuan yang mempunyai kemampuan dalam bidang politik, yang seharusnya bisa dapat bersaing dengan para laki-laki. Sistem multi-partai, banyaknya jumlah partai politik yang ikut bersaing di Indonesia untuk memenangkan kedudukan di parlemen, karena disetiap partai sangat optimis dalam memperjuangkan segala hal untuk berada di parlemen atau bahkan di eksekutif.

Berdasarkan Grafik 1 analisis crosstab Nvivo di atas bahwa dari sektor ekonomi lumayan dominan dalam mempengaruhi keterlibatan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Dari sektor ekonomi di atas peneliti dapat membagi dalam dua kategori: Pertama, modal sebagai rintangan tersendiri mengapa kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia. Terkhusus di Indonesia sendiri jika ingin berpartisipasi dalam politik praktis mempunyai modal yang terbilang besar hingga mendapatkan posisi yang baik. Menurut Pierre Bourdieu, modal sangat berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sebuah kelompok politik, persoalan dominasi termasuk problem utama sebagai bentuk aktualisasi kekuasaan (Halim, 2014:107-111).

Modal didefinisikan secara luas dan meliputi hal material yang mempunyai nilai simbolik maupun atribut yang tidak tersentuh namun juga memiliki nilai secara kultural, misalnya wibawa, otoritas dan status sebagai modal simbolik, juga modal budaya yang didefinisikan sebagai selera berbudaya dan pola konsumsi. Modal juga mempunyai fungsi, menurut Bourdieu adalah sebagai hubungan sosial dalam sebuah sistem pertukaran, mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu. Modal dalam bentuk simbolik inilah yang dikenali sebagai sesuatu yang legitimit. Kedua, Adanya keturunan tokoh politik sebagai modal agar bisa ikut berpartisipasi ke dalam politik dan mendapatkan posisi yang diinginkan karena adanya garis keturunan. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang sosiolog Meksiko, bahwa “*pentingnya garis keturunan untuk menggambarkan posisi seseorang dalam hierarki masyarakat*”.

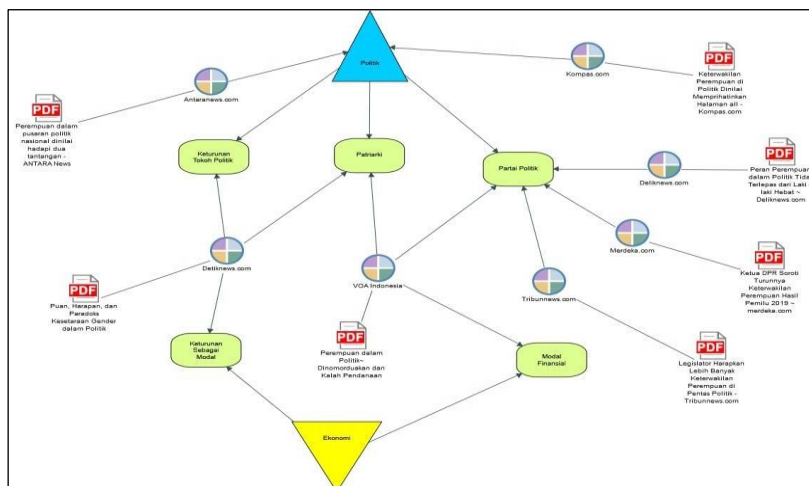
Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik yaitu berdasarkan dengan beberapa variabel yang sudah ditentukan, seperti: Pertama, partai politik yang kurang memberikan kesempatan untuk para perempuan untuk bergabung, dan kurang percaya terhadap perempuan dalam menempatkan diri diforum-forum tertentu. Kedua, patriarki yang sudah menjadi budaya untuk menghambat peran perempuan dalam politik praktis, dan perempuan juga dinomorduakan dalam membuat keputusan. Banyak perempuan yang tidak ikut serta dalam politik karena alasan budaya patriarki yang sangat kental. Menurut Bhalotra, target 30 persen kandidat perempuan tidak mudah diwujudkan oleh partai politik. Partai politik masih sulit untuk menerapkan kebijakan tersebut, karena jumlah perempuan dari partai politik masih terbatas jumlahnya. Budaya patriarki masih menjadi penghalang bagi gerakan perempuan. Ketiga, keturunan tokoh politik yang hanya bisa/ tertarik ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Dapat menjanjikan karena garis keturunan yang sudah mempunyai basis massa atau pemahaman seperti apa rintangan yang ada di dalam politik (Angin et al., 2018:2-9).

Menurut Milbrath dan Goel, partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dari warga negara yang ingin berusaha agar dapat mempengaruhi serta mendukung pemerintah dan politik. Kondisi seperti ini dapat berimplikasi yang sangat luas karena tidak hanya untuk berperan aktif yang diikuti oleh masyarakat untuk mempengaruhi proses politik dan

dampak positifnya yang banyak, tapi juga simbolik atas dukungan dalam kegiatan (Mantovani & Santoso, 2015:86-88).

Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang sampai dengan disahkannya menjadi Undang-undang Pemilu tahun 2003 menjadi perjuangan perempuan, telah tercantum kuota 30 persen yang seharusnya dapat mengubah paradigma berfikir yang tadinya patriarkis ke cara berfikir yang lebih modern, menekankan kesetaraan gender. Pembagian kerja yang terus dipertahankan dalam ideologi patriarki, para ahli filsafat yang mempertahankan patriarki seperti Whitbeck, Engels, Aristoteles, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan Stuart Mill tahun 1869 yang menggugat pandangan Aristoteles, dkk. Stuart Mill mengatakan bahwa perempuan atau laki-laki adalah hasil dari pendidikan. Namun pada kenyataannya konsep Mill yang lebih melihat ada rekayasa politik agar dapat mengunggulkan peran dari laki-laki yang masih saja terus diperdebatkan dan belum bisa diterima (Sahi, 2012:3-7).

Meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam bidang politik menjadi tuntutan yang harus dapat diimbangi dengan menjamin bahwa perempuan yang menjadi legislatif memang benar-benar harus mempunyai kualitas, dan mampu untuk memperjuangkannya. Di dalampasal 27 Undang-undang Dasar 1945 (Konstitusi) “wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria”, dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang hukum.



Gambar 2. Relasi Hambatan Perempuan dalam Politik

Berdasarkan gambar 2 hasil *concept map analysis* Nvivo di atas menunjukkan bahwa pemetaan yang menemukan sejumlah indikator hambatan partisipasi perempuan dalam politik yang di strukturkan oleh beberapa media bereputasi sebagai berikut.

Budaya Patriarki

Tema yang tidak kunjung usai adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Erich Fromm, pertentangan dapat terjadi hubungan kedua jenis kelamin ini sudah berlangsung sekitar enam ribu tahun silam. Dalam hubungan ini sudah menjadi persoalan ketika terjadi ketimpangan serta terdapat relasi subordinasi. Dari bentuk penantangan para perempuan atas kehendak laki-laki tidak dapat dilepas dari patriarki, yang hanya menempatkan perempuan sebagai bayang laki-laki (Nurchayyo, 2016:32-34). Terciptanya konstruksi sosial bawasannya perempuan adalah kelompok yang lemah, baik hati maupun fisiknya (Sakina, 2017:73-74). Budaya patriarki ini memosisikan laki-laki menjadi kelompok yang paling gagah, dan mempunyai keleluasaan dalam melakukan apapun itu terhadap perempuan. Hal ini berdampak pada tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Berhubungan dalam konteks budaya yang ada di Indonesia masih sangat dominan pada patriarkinya. Hal ini sering menjadi acuan pada pendapat yang sering didengar, yaitu bidang politik hanya untuk para laki-laki, jadi oleh sebab itu tidak pantas bagi para perempuan untuk menjadi salah satu dari bagian itu.

Keturunan Tokoh Politik

Budaya politik familisme adalah sesuatu fenomena yang sangat kuat di Indonesia. Yang dapat mempengaruhi lahirnya politik dinasti, dilihat dari bentuk hubungan darah langsung dan afeksi, solidaritas dan kepercayaan (quasi-familisme) hingga (egois-familisme). Ini adalah wujud norma serta nilai budaya yang berkembang digolongkan masyarakat, cocok atau tidaknya dalam budaya Indonesia bisa dilihat/ diukur dari kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan tujuannya.

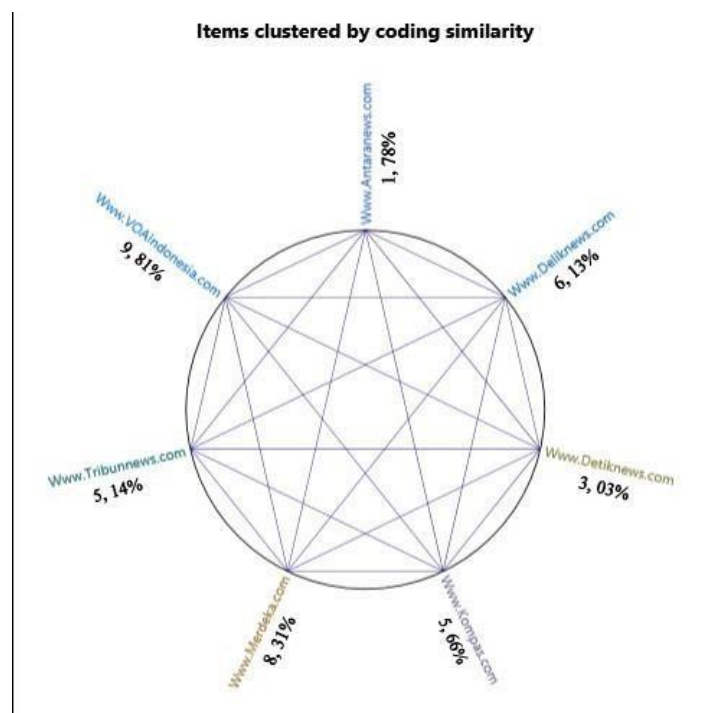
Partai Politik

Institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya dalam hal pengajuan bakal calon legislatif maupun eksekutif oleh parpol kerap kali hanya dilakukan demi untuk sebatas memenuhi persyaratan pemilu. Sampai saat ini nyaris tiak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen partai politik. Adapula kurang seriusnya kaderisasi partai politik juga menyebabkan kader perempuan tidak mempunyai kualitas. Begitu banyak kader politik dadakan muncul saat

proses politik berlangsung. Selanjutnya pola rekrutmen internal partai politik yang masih menjadi urusan dapur partai politik dan belum sepenuhnya demokratis menjadi salah satu tantangan partisipasi perempuan dalam mendorong kebijakan afirmasi.

Pendidikan Politik

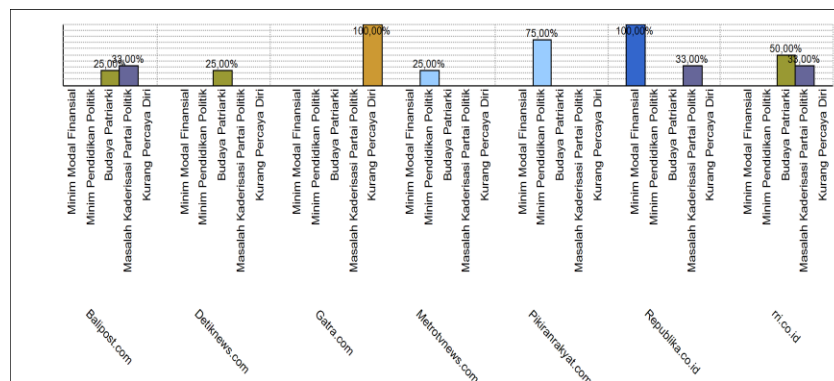
Proses dalam perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia dengan mengupayakan pendidikan. Hal ini sangat berperan dalam penyerapan atau kemampuan dalam berkomunikasi. Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk orientasi politik pada setiap individu. Meliputi konsep yang mendasar atas pemaknaan politik serta bagaimana mencari solusi atas kepentingan bersama dengan keputusan-keputusan dalam tata bernegara yang baik. Sikap politik dalam berkomunikasi menjadi sesuatu yang penting, mempunyai etika, moral, serta akhlak yang baik. Selain itu bertujuan untuk serta hadir ataupun aktif di tengah masyarakat maupun organisasi yang ada. Pendidikan politik adalah aktivitas yang terus menerus berlanjut dalam kehidupan manusia, yang membentuk kesadaran, kepribadian, serta partisipasi. Pendidikan politik juga memiliki dasar ideologis, sosial-politik (Soeharto, 2011:328-332).



Gambar 3. Relasi Media

Selain menunjukkan relasi antara beberapa media dan mendapatkan beberapa variabel permasalahan yang ada dalam partisipasi, analisis cluster juga menunjukkan bahwa

tinggi rendahnya nilai tingkat kepadatan konektivitas (jumlah garis penghubung) antara media-media yang relevan dan dipilih sesuai dengan popularitas media tersebut. Tinggi nilai kesamaan konten dari masing-masing media yang dianalisis bergantung pada frekuensi kata yang dibentuk oleh para informan media tersebut (Howard et al., 2018:8-10). Gambar di atas menunjukkan bahwa adanya nilai kesamaan konten dari beberapa media website yang dibentuk oleh masing-masing media, di mana untuk media www.VOAIndonesia.com 9,81%, disusul oleh www.merdeka.com 8,31%, www.deliknews.com 6,13%, www.kompas.com 5,66%, www.tribunnews.com 5,14%, www.Detiknews.com 3,03%, Www.Antarane.com 1,78%. Nilai-nilai kesamaan konten tersebut menunjukkan bahwa masing-masing media memproduksi narasi dan opini politik dari informan yang berhubungan dengan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.



Grafik 2. Hambatan Perempuan dalam Politik

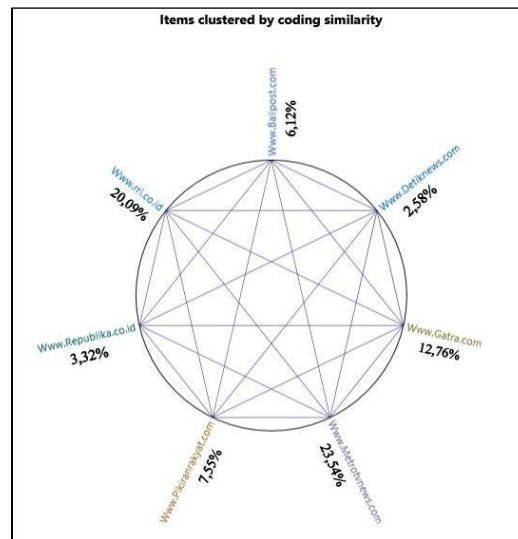
Berdasarkan grafik 2 hasil analisis crosstab query di atas dari beberapa website yang bereputasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan, dan terdapat juga permasalahan dari tahun ketahun belum bisa diminimalisir. Seperti, Pertama Minimnya pendidikan politik yang masih menjadi hambatan para perempuan dalam berpartisipasi dalam bidang politik. Kedua, patriarki yang sudah menjadi budaya. Hal ini menjadi catatan penting yang harus ditindaklanjuti bersama dalam membuat kebijakan yang lebih menekankan kesetaraan gender dalam legislatif maupun eksekutif. Ketiga, masalah kaderisasi partai politik dari tahun ketahun yang mengaggap para perempuan hanya sebagai pemanis panggung politik, yang tidak dilihat dari kualitasnya. Perempuan hanya sebagai syarat administratif agar bisa ikut dalam pemilu, perempuan yang dipilih juga hanya mengandalkan popularitas, bukan dilihat dari kualitasnya. Keempat, modal finansial menjadi catatan terakhir dalam permasalahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini

www.pikiranrakyat.com). Namun dari keempat hambatan yang sudah dipetakan, setiap tahun masih didominasi hambatan yang sama dan menjadi rintangan untuk perempuan. Ada hambatan yang lain jika berpartisipasi dalam politik, yaitu seperti yang dilansir dalam www.gatra.com menyebutkan bahwa kurangnya perempuan dalam bidang politik karena mereka kurang percaya diri dalam memberikan pendapat atau solusi.

Berhubungan pada faktor seleksi yang dilakukan dalam partai politik, media selalu berperan dalam mewujudkan opini publik bahwa pentingnya partisipasi perempuan. Kurangnya jaringan atau bahkan tidak ada sama sekali jaringan antar organisasi, LSM, maupun partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Kehadiran perempuan hanya sebagai pemanis politik (Abdullah, 2016:284). Orang yang terlibat dalam politik praktis seharusnya mempunyai tuntutan sejarah demokrasi Indonesia yang membutuhkan proses pembelajaran yang sangat panjang. Yang sering masuk ke dalam politik hanya jajaran artis bukan berasal dari masyarakat umum. Keterlibatan dalam politik masih membutuhkan popularitas dan uang. Dari banyak kasus yang ada bahwa uang merupakan indikator yang sangat signifikan dalam kemenangan. Tidak jarang para perempuan yang terlibat dalam politik memiliki/berasal dari latar belakang aktivis politik ataupun sudah menguasai kehidupan politik. Faktor emosional yang paling sering terjadi dalam partisipasi perempuan dalam politik karena hanya melihat dari sisi agama dan suku (Yuriska, 2015:13). Adanya pengaruh dari orang tua, suami, maupun keluarga serta kerabat yang mempunyai pengalaman dalam bidang politik sehingga dapat memengaruhi anaknya untuk dapat berkecimpung di dunia politik (Susanti, 2015:12).

Kebanyakan orang yang berpendapat bahwa dalam dunia politik adalah dunia yang keras. Jika perempuan ikut berpartisipasi di dalamnya tidak akan cocok. Hal ini juga menjadi sesuatu yang buruk bagi perempuan. Karena sesuatu yang diisi oleh laki-laki dalam panggung politik pasti sangat dominan pada pembuatan kebijakan yang mereka buat, bisa saja dapat merugikan para perempuan. Banyak produk hukum dari skala lokal maupun skala nasional yang menyudutkan perempuan. Seperti contoh apa yang ada di Provinsi Riau terdapat kurang lebih 14 Perda yang mendiskriminasi perempuan (Yopi Pranoto, 2015:7). Sebagai ruang publik, politik dianggap sebagai aktivitas yang tidak cocok untuk perempuan, karena bersifat kasar, dan kotor. Dalam pemilihan peranan dan struktur lebih cenderung berlangsung karena pertimbangan seksual. Patriarki menciptakan afiliasi yang menyimpang antara laki-laki dengan perempuan karena sesuai pemikiran yang berbeda-beda

berdasarkan kenyataan. Hal tersebut mengkonstruksikan *stereotype* atas perempuan sesuai perspektif kelompok dominan (Wahid, 2013:86).



Gambar 5. Relasi Media

Berdasarkan gambar 5 cluster analysis di atas, menunjukkan adanya relasi antara beberapa media dan mendapatkan beberapa variable hambatan yang ada dalam partisipasi, analisis klaster juga menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai tingkat kepadatan konektivitas (jumlah garis penghubung) antara media-media yang relevan dan dipilih sesuai dengan popularitas media tersebut. Tinggi nilai kesamaan konten dari masing-masing media yang dianalisis bergantung pada frekuensi kata yang dibentuk oleh para informan media tersebut (Howard et al., 2018:8-10). Gambar di atas menunjukkan bahwa adanya nilai kesamaan konten dari beberapa media *website* yang dibentuk oleh masing-masing media, di mana untuk media www.metronews.com 23,54%, disusul oleh media www.RRI.co.id 20,09%, www.gatra.com 12,76%, www.pikiranrakyat.com 7,55%, www.balipost.com 6,12%, www.republika.co.id 3,32%, dan terakhir yaitu www.detiknews.com 2,58%. Nilai-nilai kesamaan konten tersebut menunjukkan bahwa masing-masing media menciptakan narasi dan opini politik dari informan yang berhubungan dengan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

Kebijakan Perwakilan Perempuan

Pada saat pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004 di Jember hanya ada 10 partai politik dari 24 parpol yang berlaga dalam pemilihan umum yang berhasil merekrut kandidat perempuan hingga 30%. Dilihat dari kebijakan yang ada, maka 14 partai politik tidak

menerima sanksi. Komisi pemilihan umum Kabupaten Jember hanya memiliki wewenang sebatas untuk membuat informasi publik melalui media massa baik cetak ataupun elektronik, dan pemerintah berharap, dengan informasi ini publik akan tahu ada 10 partai politik yang telah mencapai target kebijakan dan 14 partai politik yang tidak sampai target kebijakan (Angin et al., 2018:2-9). Meskipun kebijakan tersebut telah mengatur presentase jumlah kandidat perempuan, yang harus dicapai oleh partai politik, pada kenyataannya tidak semua partai mencapai target. Ada 24 partai politik yang berkontestan di pemilu, tetapi hanya beberapa partai politik yang yang mencapai target.

Dengan adanya kebijakan kuota 30 persen, maka jatah tersebut dapat dianalisis dengan dua hal, yakni negara mengakui bahwa perempuan mempunyai keleluasaan dalam berpolitik, atau bahkan hanya sebagai pembatasan terhadap representasi perempuan dalam politik Indonesia. Dalam kenyataannya kuota 30 persen sudah diterapkan, dari 9 partai tidak ada yang mentaati kebijakan 30 persen yang menghadirkan perempuan dalam partai politik. Perwakilan perempuan terendah yang ada di parlemen yaitu PKS yang jumlahnya 5,3 persen, sementara dari Partai Demokrat memiliki perwakilan 24,3 persen. Dengan tidak patuhnya partai politik atas kebijakan 30 persen, menjadikan kuota tersebut tidak benar-benar menciptakan ruang politik bagi perempuan di legislatif. Jatah 30 persen tidak juga dapat mempengaruhi partisipasi politisi perempuan dalam merumuskan undang-undang maupun kebijakan yang lain. Tidak juga bisa negosiasi politik perempuan dalam membuat kebijakan tertentu. Pada akhirnya jatah 30 persen hanya sebatas pencitraan yang menjelaskan jika perempuan Indonesia diberi keleluasaan untuk berpolitik yang formal (Jati, 2016:208).

KESIMPULAN

Partisipasi perempuan dalam politik seharusnya bisa seimbang dengan laki-laki yang secara masif dominan menduduki jabatan politik. Namun, beberapa hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik (legislatif dan eksekutif). Ini karena adanya beberapa faktor masih mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik, seperti budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat yang memperkuat semua aspek kehidupan politik, terutama di lembaga-lembaga tertinggi sebagai pembuat kebijakan. Peran laki-laki menjadi dominan dalam bidang politik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Lebih lanjut, modal sebagai hambatan tersendiri mengapa kurangnya partisipasi perempuan

dalam politik di Indonesia. Di Indonesia sendiri jika ingin berpartisipasi dalam politik praktis mempunyai modal yang terbilang besar. Partai politik kurang memberikan kesempatan untuk para perempuan untuk bergabung dan kurang percaya terhadap perempuan dalam menempatkan diri di forum-forum tertentu. Keturunan tokoh politik yang hanya bisa ikut berpartisipasi dalam bidang politik, dapat menjanjikan karena garis keturunan yang sudah mempunyai basis massa atau pemahaman seperti apa rintangan, kepentingan, bahkan konflik yang ada di dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2016). Politisasi Gender Dan Hak-Hak Perempuan Kendala Struktural Keterlibatan Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(2), 277–290. <https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V7I2.1016>
- AlYahmady, H. H., & Al Abri, S. S. (2013). Using Nvivo for Data Analysis in Qualitative Research. *International Interdisciplinary Journal of Education*, 2(2), 181–186. <https://doi.org/10.12816/0002914>
- Angin, R., Yuswadi, H., Patriadi, H. B., & Dyah Gianawati, N. (2018). The Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 33. <https://doi.org/10.26618/ojip.v8i1.960>
- Ani Purwanti. (2015). *Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif*.
- Anshor, M. U. (2008). *Tantangan Kepemimpinan Perempuan*. 3(1). <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/189>
- Asnawi, H. S. (2012). *Kembali ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. 67–84.
- Avdeyeva, O. A., & Matland, R. E. (2020). *Gender-Trait and Ethnic Biases in Russian Regions : Ethnic Integration , Regional Economies , and Women in Local Politics*. <https://doi.org/10.1017/S1743923X2000001X>
- Balipost. (2019, April 1). Perempuan Bali dalam Kanca Politik. Diakses 12 Januari 2020: <http://www.balipost.com/news/2019/04/01/72053/Perempuan-Bali-dalam-Kancah-Politik.html>
- Bawa, S., & Sanyare, F. (2013). Women’s Participation and Representation in Politics: Perspectives from Ghana. *International Journal of Public Administration*, 36(4), 282–291. <https://doi.org/10.1080/01900692.2012.757620>
- Beritasatu. (2019, November 11). Di Depan Jokowi, KPU Paparkan Partisipasi Perempuan di Pemilu Naik. Diakses 12 Januari 2020: <https://www.beritasatu.com/politik/584661/di-depan-jokowi-kpu-paparkan-partisipasi-perempuan-di-pemilu-naik>

- Beritasatu. (2019, April 21). Hari Kartini, Kedudukan Perempuan dalam Politik makin Tumbuh. Diakses 12 Januari 2020: <https://www.beritasatu.com/nasional/549994-hari-kartini-kedudukan-perempuan-dalam-politik-makin-tumbuh>
- Brandão, C. (2015). P. Bazeley and K. Jackson, *Qualitative Data Analysis with NVivo* (2nd ed.) . *Qualitative Research in Psychology*, 12(4), 492–494. <https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750>
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Carter, R., & Nunan, D. (1975). *Introducing Applied Linguistics an A-Z Guide*. Penguin Group USA.
- Chowdhury, F. D. (2009). Problems of women’s participation in Bangladesh politics. *Round Table*, 98(404), 555–567. <https://doi.org/10.1080/00358530903151748>
- Detiknews. (2018, Agustus 20). Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Diakses 12 Januari 2020: <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>
- Ennaji, M. (2016). Women, Gender, and Politics in Morocco. *Social Sciences*, 5(4), 75. <https://doi.org/10.3390/socsci5040075>
- Ertan, S. (2020). The Impact of Regional International Parliaments on Governments’ Policy Frameworks for Gender Equality. *Politics and Gender*, 1–29. <https://doi.org/10.1017/S1743923X20000021>
- Gatra. (2019, Maret 6). Maksimalkan Keterlibatan, Perempuan Harus Pedepolitik. Diakses 12 Januari 2020: <https://www.gatra.com/detail/news/396765-Maksimalkan-Keterlibatan-Perempuan-Harus-Pede-Berpolitik>
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal* (Moh. Ansori (ed.)). LP2B.
- Howard, P. N., Kelly, J., & François, C. (2018). The IRA , Social Media and Political Polarization in the United States , 2012-2018. *Computational Propaganda Research Project*, 2012–2018. <https://digitalcommons.unl.edu/senatedocs/1/>
- Hulwati. (2008). *Perempuan Dalam Alam Wacana Politik Islam*. 3(1), 62–76.
- Jati, W. R. (2016). Historisitas Politik Perempuan. *Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 24(November 2014). <https://doi.org/10.15294/paramita.v24i2.3123>
- Kompas. (2019, November 11). Partisipasi Politik Perempuan Naik. Diakses 12 Januari 2020: <https://kompas.id/baca/utama/2019/11/11/partisipasi-politik-perempuan-naik/>
- Makassartoday. (2019, Desember 1). KPPI Sulsel Siap Target 40 Persen Keterwakilan Perempuan 2024. Diakses 12 Januari 2020: <http://makassartoday.com/2019/12/01/kppi-sulsel-siap-target-40-persen-keterwakilan-perempuan-2024/>

- Mantovani, S. L., & Santoso, M. A. F. (2015). *Tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia*. 83–92. <https://doi.org/10.23917/profetika.v16i1.1835>
- Marhayani, D. A. (2017). *The Participation Of Women In The Political Arena In The City Of Singkawang*. 9–13. <https://doi.org/10.26737/jpipi.v2i1.294>
- McArthur, T., Lam-McArthur, J., & Fontaine, L. (2018). *The Oxford companion to the English language* (Revised). Oxford University Press.
- Metronews. (2019, November 29). KPPI Tingkatkan Partisipasi Politik Perempuan. Diakses 12 Januari 2020: <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCq4yV-kppi-tingkatkan-partisipasi-politik-perempuan>
- Moleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (T. Surjaman (ed.); 4th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muasomah. (2019). Kecerdasan Emosional Perempuan Kuwait dalam Novel 'Uyūn 'alā-Samā'. *Muwazah*. 11(2). 245-262.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257–270. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125>
- Nunan, D. (1993). *Introducing Discourse Analysis*. Penguin Books.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- O'Halloran, K. (2011). Critical discourse analysis. *The Routledge Handbook of Applied Linguistics*, 445–459. <https://doi.org/10.4324/9780203835654>
- Oktaviani A. S. (2011). Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal. *Pluralitas Agama Dalam Keluarga Jawa*, 3(1), 92–102. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938>
- Patricia, S., & Villagra, C. (2015). *From Resident to President: The Sinuous Participation of Paraguayan Women in Politics and the Emergence of the Feminist Political*. 10, 219–241. <https://doi.org/10.15446/cp.v10n20.53898>
- Pikiranrakyat. (2019, Februari 28). Partisipasi Perempuan dalam Politik Belum Di Barengi Penguatan Pendidikan Politik. Diakses 12 Januari 2020: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01307118/partisipasi-perempuan-dalam-politik-belum-dibarengi-penguatan-pendidikan-politik>
- Republika. (2019, Agustus 30). Perludem: Caleg Perempuan Terpilih Meningkatkan, tak Signifikan. Diakses 12 Januari 2020: <https://republika.co.id/berita/px1m8o409/perludem-caleg-perempuan-terpilih-meningkat-tak-signifikan>

- RRI. (2019, Agustus 30). Partisipasi Politik Perempuan Pemilu 2019 Meningkat. Diakses 12 Januari 2020: <https://rri.co.id/1455-pemilu-2019/714778/partisipasi-politik-perempuan-pemilu-2019-meningkat>.
- Sahi, N. A. (2012). Studi partisipasi politik perempuan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi (Jia)*, 8(1), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jia/article/view/6278>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Salzmann, Z., & Trask, R. L. (2000). Key Concepts in Language and Linguistics. In *Language* (Vol. 76, Issue 4). <https://doi.org/10.2307/417239>
- Soeharto, A. (2011). Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Journal of Muwazah*, 3(1), 325–333. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/7%3E>.
- Sudharmono. (1995). *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* (p. 10). <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31576/19118>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (S. Y. Suryandari (ed.); Edisi ke-3). ALFABETA.
- Susanti, S. (2015). *Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan*. 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i1.906>
- Szymoniak, K. (2011). *Let Women Out And Men In . The Swedish Gender Equality Politics*. 53–71. <https://doaj.org/article/1247d82f984e46adb7de55a772201475>
- Vianello, M. L. C. and M. (2014). *Present Prospects for Women ' S Political Participation in Italy*. 6(3), 317–331. <https://doi.org/10.1177/019251218500600306>
- Wahid, U. (2013). Perempuan dan kekuasaan politik dalam pemilu pada DKI Jakarta tahun 2012. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 29(1), 73–97. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i1.5682>
- Yopi Pranoto. (2015). *Peran Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Riau Masa Bakti 2009-2014*. 081373808761, 1–18. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5044/4926>
- Yuriska, N. (2015). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013 (Studi Kasus Di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa*, 1(2), 1–12. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5560>
- Zarzecki, T. W., & Zarzecki, T. W. (2019). The Global Diffusion of Arms. *Arms Diffusion*, May, 3–18. <https://doi.org/10.4324/9781315811024-1>